

Kepemilikan Keluarga, Hubungan Politik, dan Family Aligned Board Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Lutfiana Cahya Ningrum, Erma Setiawati

Universitas Muhammadiyah Surakarta

lutfianacuplis@gmail.com

Dikirim : 26 Januari 2022

Diterima : 22 Februari 2022

ABSTRACT

Corporate governance is a system designed to direct the management of the company. Corporate governance has five principles based on the Decree of the Minister of SOE Number PER-01/MBU/2011, namely transparency; independency; accountability; fairness and responsibility. This study aims to determine the effect of family ownership, political relations, and family aligned board on the implementation of governance in the companies that enter Indonesia's top 50 mid cap issuers by Institute for Corporate Directorship (IICD) 2017-2019. Sampling technique with the method purposive sampling with a final sample of 57 companies. Testing the data using multiple linear regression. The results show that political relations have a negative effect on corporate governance. While family ownership and family aligned board has no effect on corporate governance.

Keywords: *family aligned board; political relations; family ownership; system manage company.*

ABSTRAK

Tata kelola perusahaan diartikan sebuah sistem yang perancangannya digunakan untuk memberikan arahan dalam proses mengelola perusahaan. Tata kelola perusahaan ini memiliki lima prinsip yang diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 diantaranya yaitu transparansi; kemandirian; akuntabilitas; kewajaran dan pertanggungjawaban. Penelitian ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk mencari tahu bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari kepemilikan keluarga, kemudian hubungan politik dengan *family aligned board* terhadap proses implementasi tata kelola perusahaan yang masuk top 50 emiten mid cap Indonesia oleh Institute for Corporate Directorship (IICD) tahun 2017-2019. Proses pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan memakai teknik pengambilan sampel metode *purposive sampling* dan diperoleh 57 perusahaan sebagai sampel akhir. Teknik yang digunakan dalam proses pengujian data dalam penelitian ini adalah teknik regresi linier berganda. Penelitian ini memberikan hasil yang

menunjukkan bahwa adanya pengaruh negative yang diberikan hubungan politik pada tata kelola perusahaan. Kemudian untuk variabel kepemilikan keluarga keluarga dan *family aligned board* tidak berpengaruh terhadap tata kelola perusahaan.

Kata kunci: *family aligned board*; hubungan politik; kepemilikan keluarga; tata kelola perusahaan.

A. PENDAHULUAN

Adanya peristiwa krisis ekonomi yang telah terjadi pada tahun 1998 dan 2008 lalu menyebabkan kegagalan dalam upaya menerapkan dan pengawasan tata kelola pada sebuah perusahaan. Akibat adanya tata kelola perusahaan yang tidak baik banyak perusahaan yang menghadapi masa keterpurukan, sehingga mengakibatkan *fraud* yang memungkinkan adanya penurunan nilai dari perusahaan tersebut (Mathova et al., 2017). Krisis pada perusahaan ini akan mendorong terjadinya sebuah reformasi dalam perusahaan dan menimbulkan banyaknya inisiatif yang mampu menguatkan ekonomi secara nasional dan peningkatan kerjasama skala regional (OJK, 2014). Tentunya reformasi dalam sebuah perusahaan perlu adanya aspek-aspek yang mampu menjadi kunci tata kelola perusahaan untuk lebih baik.

Indonesia dalam menerapkan praktik tata kelola pada berbagai perusahaan dapat dinilai relatif mengalami perbaikan dan peningkatan, hal ini dapat dilihat berdasarkan peringkat Indonesia dalam *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) pada tahun 2015 Indonesia mencapai 62,88, kemudian pada 2017 mengalami peningkatan mencapai 70,59 (WE Online Jakarta, 2018). Selama dua tahun ini, rata-rata peringkat Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup positif yaitu sebesar 0,3% dari 70,59 dari tahun 2017, dan pada tahun 2019 ini mencapai 70,8 (Angela RMS, 2019). Penilaian yang dilakukan oleh ACGS pada tahun 2019 menjelaskan bahwa ada perusahaan yang menunjukkan sebuah usaha luar biasa dan adanya peningkatan yang sangat signifikan dalam menerapkan dan mengungkapkan praktik dari tata kelola perusahaan. Namun, berdasarkan hasil survei yang terjadi pada tahun 2019 hasil skor penilaian yang dilakukan oleh dilakukan *World Economic Forum* terkait aspek tata kelola Indonesia di *Global Company Index* mengalami penurunan yaitu berada pada peringkat 57. Penurunan ini perlu menjadi perhatian oleh berbagai pihak termasuk berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya dan bagaimana seluruh perusahaan di Indonesia mampu mengatasi permasalahan dengan berbagai strategi yang akan ditempuh.

Pada saat ini di Indonesia bisnis keluarga mengalami perkembangan yang sangat pesat dan telah menjadi bisnis yang mendominasi perusaan di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Price Water House Cooper (2014) dominasi bisnis keluarga di Indonesia mencapai 95% dari keseluruhan bisnis yang ada di Indonesia. Selain itu perusahaan di Indonesia merupakan pemegang peran penting dalam istilah generasi tenaga kerja dan untuk pertumbuhan maupun perkembangan ekonomi negara (Louie et al., 2019). Perusahaan dengan kepemilikan keluarga pada dasarnya memiliki aspek kinerja yang didasarkan dan diatur oleh keluarga yang mampu memberikan dampak baik terhadap berjalannya perusahaan, hal ini keluarga memiliki hak kendali pada perusahaan sehingga perusahaan mampu dikendalikan secara efektif dan mampu memberikan strategi yang dibuat dapat berjalan dengan lancar (Radiawati, 2015). *Global Next*

Gen PwC pada tahun 2019 mampu mengidentifikasi bahwa sebagian besar dari generasi penerus memiliki keterlibatan yang tinggi dalam perusahaan keluarga, dan menemukan bahwa sekitar 48% telah menjalankan sistem operasi internal dan 26% diantaranya telah memiliki kedudukan sebagai direktur eksekutif (PwC Indonesia, 2019). Anggota keluarga dari keluarga pendiri yang menempatkan pimpinan puncak seperti komisaris dan direktur tentu akan sangat besar mengontrol hak agar tidak mudah didisiplinkan jika melakukan kesalahan atau penyimpangan yang berbeda dengan dewan profesional tanpa bagian yang signifikan kepemilikan.

Berjalannya sebuah perusahaan tentu tidak terlepas dari adanya kerjasama. Kerjasama tidak hanya dilakukan sesama bidang bisnisnya namun juga tidak terlepas dari keterlibatan stakeholder lainnya misalnya pemerintah. Hal ini mengapa bisnis dengan politik dikatakan sebagai kedua hal yang saling berkaitan. Dunia politik disini pada dasarnya memiliki tujuan untuk mampu merumuskan kebijakan publik dimana didalamnya termasuk kepentingan dunia bisnis. Disinilah kepentingan dari dunia bisnis mampu mendukung politik dalam berbagai aspek seperti pada aspek pendanaan (T. Wulandari & Raharja, 2013). Tidak hanya itu untuk mencapai kesuksesan yang optimal, sebuah perusahaan mempunyai kecenderungan dalam melakukan pendekatan bisnisnya kepada pihak pemerintah ataupun dengan politisi. Hal ini dikatakan mampu memberikan beberapa manfaat yang akan didapatkan perusahaan misalnya seperti pemerintah memberikan subsidi, perusahaan mampu memperoleh potongan pajak, bahkan perusahaan akan mendapatkan kekuatan pasar dan yang lainnya (Aldhamari, 2015). Namun, pada saat politikus menggunakan kekuatan ataupun pengaruhnya terhadap keputusan yang bertujuan untuk kepentingan politik, akan mengakibatkan perusahaan mengalami kegagalan dalam proses implementasi dari prinsip tata kelola sebuah perusahaan yang baik. Dengan demikian perlu untuk pelaku bisnis tidak hanya melihat bagaimana manfaat yang akan didapatkan dari keterkaitan politik maupun pemerintah dalam proses berjalannya bisnis, namun perlu untuk mengetahui dampak serta strategi yang perlu dilakukan apabila akan melakukan kerjasama dengan bidang politik dalam perusahaannya.

B. KAJIAN LITERATUR

Teori keagenan berkenaan dengan proses penyelesaian dua persoalan yang muncul akibat adanya hubungan agensi. Masalah yang berkaitan dengan keagenan dapat lahir ketika (a) adanya perbedaan dari keinginan dengan tujuan dari *agen*, dan *principal* serta (b) adanya kesulitan atau mahalannya bagi *principal* untuk melakukan verifikasi hal apa yang benar-benar dilakukan oleh *agen*. Adanya sebuah pertentangan kepentingan diantara *agen* dan *principal* akan mengakibatkan sebuah masalah yang pada didalam teori keagenan dapat dikenal dengan *Asymmetric Information* yang diartikan sebagai sebuah informasi yang tidak memiliki keseimbangan karena diakibatkan dari adanya ketidaksesuaian dengan distribusi informasi diantara *principal* dan *agen*. Kemudian, yang menjadi tujuan utama ini adalah untuk memberikan kejelasan mengenai bagaimana berbagai pihak tersebut menjalankan hubungan kontrak dan mampu memberikan gambaran kontrak yang memiliki tujuan untuk meminimalisir dari adanya *cost* sebagai dampak dari adanya kondisi yang mengalami ketidakpatian dan adanya informasi yang asimetris (Wijayanti, 2012).

Tata kelola diartikan sebagai sebuah perangkat aturan untuk mengatur hubungan diantara pemegang saham, manajemen (manajer) perusahaan, karyawan, kreditor, pemerintah maupun

seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan yang dimaksud disini tidak hanya pihak dari internal perusahaan namun juga pihak eksternal perusahaan lainnya yang memiliki keterkaitan hak dan kewajiban ataupun dengan sistem yang mengatur dan melakukan pengawasan perusahaan serta hubungan diantara *stakeholders* ataupun pemangku kepentingan. Tujuan dari adanya tata kelola ini adalah untuk melakukan penentuan dan pengawasan terhadap arah dan strategi kinerja perusahaan. Terdapat beberapa prinsip yang perlu untuk diperhatikan dalam proses penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang dijelaskan pada Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 diantaranya yaitu transparansi, kemandirian akuntabilitas, kewajaran, dan pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip yang telah diatur ini perlu ditekankan dalam proses implementasi tatakelola sebuah perusahaan yang nantinya akan mampu menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih baik

Kepemilikan keluarga adalah sebuah perusahaan yang anggotanya berasal dari sebuah keluarga pemilik perusahaan yang kemudian menjabat dengan posisi sebagai dewan direksi atau sebagai pemegang saham yang dominan. Pemisahan manajemen terhadap kendali kepemilikan perusahaan ini jarang sekali terjadi dalam perusahaan yang dimana sahamnya berkonsentrasi pada pemilik keluarga perusahaan. Pada sebuah perusahaan kehadiran keluarga dalam manajemen sebuah perusahaan dan mendapatkan sebuah keuntungan untuk mendapatkan informasi dalam sebuah perusahaan mampu mengakibatkan kepemilikan dari keluarga sendiri mendominasi dalam adanya pengungkapannya informasi sebuah perusahaan (Vural, 2018). Terlibatnya *outsider ownership* dapat dikatakan sebagai alat pemantau dalam manajemen perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan hanya ada keterlibatan dari *manager ownership* dalam kepemilikan dari perusahaan, bahkan apabila yang menjadi pemegang saham besar perusahaan atau *large shareholders* adalah pihak *outsider ownership* (Laiho, 2012).

Koneksi politik merupakan sebuah keterlibatan politik diantara pejabat tinggi, pemerintah dan pemegang saham. Terbentuknya koneksi politik ini terjadi dengan adanya hubungan secara langsung yang dimana hubungan ini terjadi diantara manager puncak, pemegang saham, karyawan dan politisi yang terlibat dalam kegiatan politik pada situasi saat ini maupun dimasa lalu, kemudian koneksi politik yang terbentuk dari adanya hubungan yang tidak secara langsung. Menurut Gomez dan Jomo (2009) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik ialah sebuah perusahaan atau konglomerat yang memiliki kedekatan hubungan dengan pemerintah. Perusahaan memiliki kedekatan hubungan dengan pemerintah disini diartikan sebagai sebuah perusahaan milik pemerintah, biasanya berbentuk BUMN dan BUMD. Hubungan yang dibina tidak secara langsung dapat berupa adanya keterlibatan atau kontribusi dalam kegiatan kampanye atau segala aktivitas yang berkaitan dengan praktik untuk membina hubungan atau mencoba membujuk terhadap tujuan untuk kepentingan tertentu (Bianchi & Viana, 2014).

Perusahaan yang memiliki koneksi dengan politik merupakan sebuah perusahaan dengan kepemilikan berbagai cara tertentu serta memiliki ikatan serta politik ataupun melakukan upaya untuk memiliki hubungan kedekatan dengan politisi ataupun pemerintah. Koneksi dengan politik ini dianggap sebuah sumber yang dinilai berharga untuk menunjang kekayaan perusahaan. Sebuah perusahaan yang mempunyai koneksi dengan politik akan mengakibatkan adanya hubungan timbal balik, dimana hubungan tersebut diawali dengan adanya pendanaan yang diperlukan perusahaan yang berasal dari partai politik ataupun memerlukan adanya bantuan dari dunia bisnis sebagai sebuah imbalan yang dapat berupa tender dari proyek pemerintah, proses

penegakkan aturan yang berlaku, proses pembuatan peraturan pemerintah ataupun terhadap kebijakan pemerintah yang mampu memberikan kemudahan dari dunia bisnis tertentu. (Sejati, 2019). Membangun koneksi politik dengan pemerintah tentunya perlu adanya hal-hal yang harus diperhatikan misalnya imbal balik yang seperti apa yang dapat diberikan, bagaimana antara kedua belah pihak mampu memberikan kebermanfaatannya satu sama lain, bahkan akan lebih baik apabila kedua belah pihak berupaya untuk memberikan manfaat pada masyarakat atas proyek yang dibuat. Pemahaman perusahaan dalam membina koneksi politik ini sangat penting, hal ini dikarenakan koneksi politik mampu memberikan dampak dua arah terkait dengan nilai sebuah perusahaan yang mana dampak ini akan mampu mendorong peningkatan ataupun dapat membahayakan nilai dari perusahaan tersebut (Sejati, 2019).

Family aligned board, merupakan sebuah situasi dimana ketika pemilik sebuah perusahaan kemungkinan memiliki kecenderungan untuk menempatkan anggota keluarganya dalam komposisi dewan direksi dan dewan komisaris. Anderson dan Reeb (2005) menjelaskan bahwa terdapat sebuah kecenderungan dari perusahaan dalam upaya menghindari dewan komisaris dari dewan independen dengan tujuan untuk melakukan pengamanan dari kepentingan keluarga sebagai pemegang kontrol. Konsentrasi dari adanya kepemilikan keluarga yang memiliki pengaruh dalam upaya kontrol dalam proses penentuan awal dewan direksi dan dewan komisaris. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap adanya kepentingan keluarga yang menjadi pemegang saham.

C. PELAKSAAAN DAN METODE

Penelitian tidak terlepas dari adanya populasi yang akan diteliti. Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam *top 50 emiten mid cap Indonesian* secara berturut-turut dari tahun 2017-2019 yang telah diselenggarakan oleh pihak *Institute for Corporate Directorship* (IICD). Dalam menentukan sampel, metode yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling*. Peneliti menggunakan kriteria sampel sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan yang masuk dalam <i>Top 50 Emiten Mid Cap Indonesian</i> tahun 2017-2019	50
Perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan dengan nominal rupiah (Rp)	(2)
Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data-data dalam laporan yang dibutuhkan dalam proses penelitian	(29)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria	19
Total sampel dari tahun 2017-2019 atau 3 (tiga) tahun	57

Identifikasi Variabel

Jenis data pada penelitian ini yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan

dari Bursa Efek Indonesia (BEI) ataupun website masing-masing perusahaan yang menjadi sampel dan telah sesuai dengan kriteria. Penelitian ini menggunakan metode analisis berupa analisis liner berganda dimana terdapat persamaan yang menggambarkan sebuah hubungan diantara variabel terikat (Y), variabel bebas (X) maupun variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan lima variabel kontrol dari penelitian Haque, Arum, dan Krikpatrick (2011).

Tabel 2
Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Proksi
Tata Kelola	Suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan.	Berdasarkan prinsip - prinsip yang dikeluarkan OECD dan Internasional Corporate Governance Network (ICGN), yang dibagi menjadi 2 tingkatan dengan jumlah 184 pertanyaan.
Kepemilikan Keluarga	Kepemilikan tidak langsung atas keluarga tetapi kepemilikannya melalui kelompok atau perusahaan atau badan hukum yang dimiliki oleh mereka.	$\frac{\text{Jumlah saham keluarga}}{\text{Jumlah total stok}} \times 100\%$
Hubungan Politik	Bisnis yang terkoneksi politik	variabel dummy memiliki nilai 1 jika sebuah perusahaan telah terbukti mempunyai hubungan politik dan memiliki nilai 0 jika sebuah perusahaan tidak terbukti memiliki hubungan politik. (Aldhamari et al., 2013)
Family Aligned Board	merupakan anggota dari dewan komisaris dan serta direktur yang memiliki afiliasi dengan dari keluarga pemegang saham	variabel dummy, yaitu bernilai 1 apabila anggota dewan komisaris atau direktur terbukti memiliki hubungan dengan keluarga pemegang saham dan bernilai 0 apabila terbukti tidak memiliki hubungan (Wirawan & Diyanty, 2014).
Ukuran Perusahaan	berarti ukuran atau besaran aset yang kepemilikan oleh perusahaan.	Size = (Ln) Total Aset (Rahdal, 2017)
Komposisi Aset Perusahaan	Komposisi sebuah aset tetap yang tinggi dan menandakan perusahaan mempunyai aset tetap yang banyak	KAP = $\frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$ (Jafar & Diana, 2020)

Profitabilitas	sebuah perbandingan antara laba bersih dengan total aset yang ada pada akhir periode yang dipakai sebagai sebuah indikator kemampuan dari perusahaan dalam proses menghasilkan laba	$ROA = \frac{\text{Laba (Rugi) Bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$ (Prakosa, 2014)
Leverage	Rasio yang menunjukkan bahwa sebesar apa perusahaan didanai dengan hutang	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$ (Midiastuty, 2017)
Usia Perusahaan	Usia alamiah dari perusahaan	dihitung sejak perusahaan didirikan sampai dengan tahun dari laporan tahunan. (Mahari & Mulya, 2016)

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pengujian analisis regresi berganda dengan model regresi ini dituliskan sebagai berikut:

$$CG = \alpha + \beta_1 KK + \beta_2 HP + \beta_3 FAB + \beta_4 UP + \beta_5 KAP + \beta_6 PRO + \beta_7 LEV + \beta_8 USIA + \varepsilon \quad (1)$$

Dimana CG merupakan variabel terikat = Tata Kelola. $\beta_1 KK$ =Kepemilikan Keluarga, $\beta_2 HP$ = Hubungan Politik, $\beta_3 FAB$ = *Family Aligned Board*, adalah variabel bebas dan $\beta_5 KAP$ = Komposisi Aset Perusahaan, $\beta_6 PRO$ = Profitabilitas, $\beta_7 LEV$ = *Leverage*, $\beta_8 USIA$ = Usia Perusahaan, yang merupakan variabel kontrol. Variabel kontrol digunakan untuk mengontrol atau menjadi konstan sehingga adanya pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependen tidak memiliki pengaruh dari adanya faktor eksternal yang tidak dilakukan pengamatan dalam penelitian ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Proses analisis dekriptif dalam penelitian ini memberikan sebuah gambaran terkait jumlah data, kemudian nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum maupun nilai minimum serta standar devuasu dari variabel dependen yaitu tata kelola perusahaan (CG), variabel independent yaitu kepemilikan keluarga, *family aligned board*, dan hubungan politik serta dari variabel yaitu komposisi aset perusahaan, kontrol ukuran perusahaan, *leverage*, usia perusahaan dan, profitabilitas.

Tabel 3
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tata Kelola Perusahaan	57	61,05	88,84	75,13789	6,904389
Kepemilikan Keluarga	57	0	10,592	1,21375	2,785752
Hubungan Politik	57	0	1	0,35	0,481
Family Aligned Board	57	0	1	0,26	0,444
Ukuran Perusahaan	57	12,242	15,398	13,0386	0,628484
Komposisi Aset Perusahaan	57	0,005	0,914	0,45064	0,350134
Profitabilitas	57	-0,199	0,31	0,04319	0,078052
Leverage	57	0,161	4,211	0,59987	0,531012
Usia Perusahaan	57	11	64	32,79	12,673

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan dari hasil uji statistik deskriptif yang disajikan pada tabel 2, menunjukkan jumlah sampel (N) sebanyak 57 data perusahaan tahun 2017-2019. Variabel tata kelola perusahaan menunjukkan nilai *minimum* sebesar 61,05 dan nilai *maximum* sebesar 88,84. Nilai *mean* sebesar 75,137 dan standar deviasi sebesar 6,904, artinya menunjukkan data penelitian kurang bervariasi karena nilai standar deviasi kurang dari nilai *mean*. Dengan nilai rata-ratanya di atas 50 memberikan penjelasan bahwa secara keseluruhan dari sebuah perusahaan telah mengimplementasikan tata kelola dengan baik.

Variabel kepemilikan keluarga menunjukkan nilai *maximum* sebesar 10,592 dan nilai *minimum* sebesar 0 yang dimiliki oleh 19 dari 57 sampel perusahaan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa mayoritas perusahaan mempunyai sebuah kepemilikan saham berdasarkan keturunan keluarga dalam perusahaan dan. Nilai *mean* sebesar 1,213 dan standar deviasi sebesar 2,785, artinya menunjukkan data penelitian bervariasi karena nilai standar deviasi lebih besar dari nilai *mean*.

Variabel hubungan politik menunjukkan nilai *minimum* sebesar 0 dan nilai *maximum* sebesar 1 dimiliki oleh 20 dari 57 sampel perusahaan, hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas perusahaan tidak memiliki hubungan politik dalam manajemen perusahaan. Nilai *mean* sebesar 0,35 dan standar deviasi sebesar 0,481, artinya menunjukkan data penelitian bervariasi karena nilai standar deviasi lebih besar dari nilai *mean*.

Variabel *family aligned board* menunjukkan nilai *minimum* sebesar 0 dan nilai *maximum* sebesar 1 dimiliki oleh 15 dari 57 sampel perusahaan, hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas perusahaan tidak memiliki hubungan keluarga dalam jajaran Dewan Komisaris dan Direksi.. Nilai *mean* sebesar 0,26 dan standar deviasi sebesar 0,444, artinya menunjukkan data penelitian bervariasi karena nilai standar deviasi lebih besar dari nilai *mean*.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Proses analisis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Tujuan penggunaan teknik analisis regresi linier berganda ini adalah untuk melakukan proses pengujian apakah terdapat pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan sembilan variabel diantaranya yaitu tata kelola perusahaan, komposisi aset perusahaan, kepemilikan keluarga, hubungan politik, *family aligned board*, ukuran perusahaan, usia perusahaan, profitabilitas dan *leverage*.

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	Keterangan
(Constant)	47,405				
Kepemilikan Keluarga	-0,226	-0,614	2,003	0,542	H1 Ditolak
Hubungan Politik	6,297	3,16	2,003	0,003	H2 Diterima
Family Aligned Board	0,265	0,119	2,003	0,906	H3 Ditolak
Ukuran Perusahaan	1,471	0,799	2,003	0,428	Ditolak
Komposisi Aset Perusahaan	1,114	0,365	2,003	0,717	Ditolak
Profitabilitas	11,434	0,906	2,003	0,370	Ditolak
Leverage	-1,708	-0,811	2,003	0,421	Ditolak
Usia Perusahaan	0,200	2,100	2,003	0,041	Diterima

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4 dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$CG = 47,405 - 0,226 KK + 6,297 HP + 0,265 FAB + 1,471 UP + 1,114 KAP + 11,434 PRO - 1,708 LEV + 0,200 USIA + \epsilon$$

Pembahasan Hasil Penelitian Kepemilikan Keluarga

Variabel kepemilikan keluarga (KK) menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0,614 < 2,003$) dengan nilai signifikansi $0,542 > 0,05$, sehingga H1 ditolak yang hal ini berarti bahwa kepemilikan dari keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap implementasi dari tata kelola sebuah perusahaan. Keadaan ini memberikan gambaran bahwa besarnya adanya kepemilikan dari keluarga tidak menjadi faktor dalam implementasi tata kelola perusahaan. Sesuai dengan teori keagenan, yaitu pihak manajemen suatu usaha atau *agen* lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada kepentingan *principal* atau pemilik suatu usaha.

Sikap kehati-hatian anggota keluarga memiliki kecenderungan tidak menginginkan untuk memasukkan perspektif dan opini pada proses pengambilan keputusan dengan pihak luar dimana hal ini memiliki akibat bahwa akan adanya pembatasan kemampuan serta otoritas dari keluarga dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan (Gomez-Mejia et al. 2010). Pada setiap keputusan yang diambil harus memiliki pertimbangan dengan baik, apabila keterlibatan keluarga pada sebuah perusahaan yang semakin besar maka akan mengakibatkan semakin

pentingnya tujuan untuk pelestarian kekayaan dan semakin tidak adanya keinginan perusahaan untuk melakukan penganekaragaman. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarifah (2019), namun penelitian ini tidak mendukung dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wirawan & Diyanty (2014) dan Arimamukti (2018).

Hubungan Politik

Variabel hubungan politik (HP) menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,160 > 2,003$) dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$, sehingga H_2 diterima yang berarti bahwa adanya pengaruh dari hubungan politik terhadap implementasi dari tata kelola sebuah perusahaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya hubungan politik menjadikan perusahaan tersebut memiliki nilai komposit yang tinggi atau dengan kata lain perusahaan memiliki hubungan politik kurang baik dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan.

Hubungan politik pada dasarnya mampu memberikan keyakinan untuk menjadi sebuah sumber daya yang sangat berharga terhadap banyaknya perusahaan utamanya terhadap perusahaan swasta (Li et al., 2008) yang dilakukan melalui beberapa metode seperti adanya akses keuangan, pemanfaatan pajak, kekuatan pasar dan penjualan kepada pemerintah dimana pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Adanya keterlibatan politik dan bisnis atau mencampuradukkan aktivitas dari bisnis dengan bisnis pada dasarnya memberikan manfaat pada perusahaan, meski para eksekutif harus memiliki kehati-hatian dalam praktiknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syarifah, (2019), Arimamukti (2018), Sutopo et al. (2017) dan Wirawan & Diyanty (2014).

Family Aligned Board

Variabel *family aligned board* (FAB) menunjukkan bahwa t_{hitung} memiliki nilai yang lebih kecil dari t_{tabel} ($0,119 < 2,003$) dengan nilai signifikansi $0,906 > 0,05$, sehingga H_3 ditolak yang artinya *family aligned board* tidak memiliki pengaruh dengan implementasi dari tata kelola perusahaan. Anggota dewan komisaris yang diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan setiap anggota akan menjadi bagian dari dewan komisaris apabila telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artinya, pengurus terafiliasi sudah memenuhi kualifikasi atau syarat penilaian untuk mengemban tugas menjadi komisaris perusahaan.

Harun, Arun, dan Kirkpatrick (2011) menjelaskan bahwa adanya pengaruh yang negatif dari struktur kepemilikan serta politik dalam proses penetapan direksi maupun dewan komisaris dalam upaya menerapkan tata kelola perusahaan yang terdapat di Bangladesh. Dewan yang terafiliasi dengan keluarga tidak cukup kuat dalam mendorong praktik tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian yang dilakukan ini telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wirawan & Diyanty (2014), namun pada penelitian yang dilakukan oleh Syarifah (2019) penelitian ini tidak mampu memberikan dukungan.

E. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan teknik analisis regresi linier berganda penelitian ini menghasilkan bahwa variabel hubungan politik memiliki pengaruh yang negative terhadap implementasi tata kelola sebuah perusahaan. Kemudian pada variabel hubungan politik

dengan *family aligned board* tidak memiliki pengaruh dengan adanya implementasi tata kelola perusahaan. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah *self assessment* oleh peneliti hanya terbatas yang didasarkan pada adanya laporan yang dilakukan setiap tahunnya, kemudian dari laporan keuangan serta informasi yang telah tersedia secara *online* serta adanya variabel independent yang digunakan hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 16,1%. Saran yang mampu diberikan dari adanya penelitian ini selanjutnya adalah dengan menambah sampel perusahaan yang akan diteliti dan melakukan perluasan sektor yang nantinya akan dijadikan sebuah sampel.

F. DAFTAR PUSTAKA

- ACMF. (2017). <https://www.theacmf.org/publications/the-asean-corporate-governance-scorecard--->
- Alang, K. F., & Syahdan, S. A. (2020). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Keluarga, Size, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Non-Keuangan Di Indonesia). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2014), 81–93.
- Apriliani, A., & Diyanty, V. (2016). The Impact of Family Ownership and Political Connections on Earnings Management. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*, 1–22.
- Arimamukti, S. (2018). *Analisis Pengaruh Political Connection , Ownership Structure , Dan Cash Holdings*.
- Azali, V. C., Melmusi, Z., & Ilona, D. (2019). Pengaruh Keterlibatan Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Perusahaan. *Simposium Nasional Magister254 Vannesa*, 3(1).
- Azwari, P. C. (2016). Masalah Keagenan pada Struktur Kepemilikan Perusahaan Keluarga di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(2), 173–184. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i2.4021>
- Dalimunthe, S., Wardah, N., & Siregar, M. E. S. (2015). PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSI DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP DIVERSIFIKASI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR HOUSEHOLD GOODS YANG TERDAFTAR DI BURSA MALAYSIA PERIODE 2014-2018. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, 6(1), 417–439.
- Hamonangan, F. R., & Hermawan, A. A. (2020). ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE BASED ON ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD: CASE STUDY PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA). *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*, 1(4), 580–601. <https://doi.org/10.31933/DIJEMSS>
- Huber, K., & Schormair, M. J. L. (2021). Progressive and Conservative Firms in Multistakeholder Initiatives: Tracing the Construction of Political CSR Identities Within the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. *Business and Society*, 60(2), 454–495. <https://doi.org/10.1177/0007650319825786>
- IICD. (2017). *IICD IS CONDUCTING AN APPRECIATION NIGHT FOR TOP 50 BIGGEST MARKET CAP AND MID CAP OF PUBLIC LISTED COMPANIES IN INDONESIA*. <https://iicd.or.id/en/news/corporate-governance-award/2017/11/16/iicd-is-conducting-an-appreciation-night-for-top-50-mid-cap-plcs-in-indonesia/>

- IICD. (2018). *THE 10TH IICD CORPORATE GOVERNANCE CONFERENCE AND AWARD 2018*. <https://iicd.or.id/en/event2017/corporate-governance-award/2018/11/23/the-10th-iicd-corporate-governance-conference-and-award-2018/>
- IICD. (2019). *THE 11TH IICD CORPORATE GOVERNANCE AND AWARD 2019*. <https://iicd.or.id/en/event2019/corporate-governance-award/2019/10/09/award2019/>
- IICD. (2018). *Laporan Hasil Riset Asean Corporate Governance Scorecard Terhadap Pt Prodia Widyahusada Tbk*.
- Jafar, S. R., & Diana, P. (2020). AGRESIVITAS PAJAK BERDASARKAN UKURAN PERUSAHAAN, PENDANAAN ASET DAN KOMPOSISI ASET SERTA PROFITABILITAS (STUDI SEKTOR MANUFAKTUR DI NEGARA BERKEMBANG). *ULTIIMA Accounting*, 12(2), 194–213.
- Kirana, D. J., & Ermawati. (2017). PERANAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN FAMILY OWNERSHIP DI INDONESIA. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, 493–499.
- Kristanto, A. (2019). Pengaruh Political Connections Terhadap Kinerja Perusahaan. *Exero: Journal of Research in Business and Economics*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.24071/exero.v2i1.2049>
- Mathova, A., Perdana, H. D., & Rahmawati, I. P. (2017). Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba dan Kinerja Perusahaan. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 2(1), 73. <https://doi.org/10.20884/1.sar.2017.2.1.405>
- Maulana, A., & Wati, L. N. (2019). Pengaruh Koneksi Politik Dan Struktur Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.37932/ja.v8i1.59>
- Pranata, J., Purwanto, M., & Lindrawati. (2019). Pengaruh Family Ownership Terhadap Kinerja Perusahaan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Putra, R., Zakaria, Y. K. E., Hidayat, A. A., & Adelina, Y. E. (2019). Pengaruh Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perbankan di Indonesia. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(1), 98–123. <https://doi.org/10.21632/saki.2.1.98-123>
- Susanti, L. D., & Juniarti. (2017). Pengaruh Struktur Kepemilikan Keluarga Terhadap Kinerja Perusahaan Perusahaan Property Dan Real Estate. *Business Accounting Review*, 5(2), 709–720.
- Sutopo, B., Trinugroho, I., & Damayanti, S. . (2017). Politically connected banks: Some Indonesian evidence. *International Journal of Business and Society*, 18(1), 83–94.
- Syarifah, N. D. (2019). THE INFLUENCE OF FAMILY OWNERSHIP, FAMILY ALIGNED BOARD, AND POLITICAL CONNECTION TOWARD THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN BANKING INDUSTRY. *Doctoral Dissertation, STIE Perbanas Surabaya*), 77, 6000.
- Tangke, P. (2019). Pengaruh Political Connection Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Mediasi Corporate Governance. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 2(2), 65–75. <https://doi.org/10.37888/bjra.v2i2.196>
- Wardhana, D. Y. (2018). Good Corporate Governance Practices in Family Business: A Case Study in Indonesia. *Petra International Journal of Business Studies*, 1(1), 35–44.

<https://doi.org/10.9744/ijbs.1.1.35-44>

- Wirawan, B., & Diyanty, V. (2014). Kepemilikan keluarga, hubungan politik dan family aligned board terhadap implementasi tata kelola perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 18(2), 139–155. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss2.art5>
- Wulandari, L. (2018). Pengaruh Political Connection pada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1), 1196–1226.
- Wulandari, T., & Raharja. (2013). Analisis Pengaruh Political Connection Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume*, 2(1), 141–152.